PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Jl. Majapahit Nomor 5 Pekalongan (0285) 421243 – 7998152

LKjIP 2017

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

DINAS KOMINFO
KOTA PEKALONGAN

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang mana didalamnya menyebutkan SAKIP merupakan rangkaian sistematik dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklarifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Dinas Kominfo selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Dinas sebagai sub sistem dari sistem pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat

Dalam perencanaan pembangunan daerah Kota Pekalongan, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup Pemerintahan Kota, Propinsi dan Nasional.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaran negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka di

terbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sehubungan dengan hal tersebut Dinas Kominfo Kota Pekalongandiwajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Penyusunan LKjIP Dinas Kominfo Kota Pekalongan Tahun 2016 yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

B. Gambaran Umum Dinas

Kondisi atau gambaran umum daerah masa kini khususnya yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika, yaitu;

a. Masih belum meratanya pelayanan informasi kepada masyarakat

b. Sarana Komunikasi dan Informatika

c. Masih belum meratanya tingkat pengetahuan dan keterampilan masyarakat terhadap alat teknologi informasi

C. Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 17 Tahun 2013 Peraturan Walikota Nomor 52A Tahun 2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Susunan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Pekalongan disebutkan bahwa Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pekalongan mempunyai tugas dan kewajiban Membantu Walikota dalam urusan Komunikasi dan Informatika. Dalam menyelenggarakan tugas dan kewajiban tersebut Dinas Kominfo mempunyai fungsi :

a) penyusunan rencana kegiatan kebijakan dalam urusan komunikasi dan informatika;

b) pengkoordinasian, fasilitasi, dan pembinaan kegiatan komunikasi dan informatika;

c) pelaksanaan pelayanan dan pemberian rekomendasi izin di bidang komunikasi dan informatika di daerah;

d) pengelolaan sarana dan prasarana Bidang Pengelolaan Sumber Daya dan Infrastruktur Informatika, Bidang Sistem Informasi, dan Bidang Sarana Komunikasi dan Desiminasi Informasi;

e) pengelolaan administrasi, meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan,

kehumasan dan perpustakaan serta kearsipan;

f) pengkordinasian dan pembinaan kegiatan teknologi informasi dilingkungan Pemerintah Kota Pekalongan;

g) pengkoordinasian, pengendalian, pembinaan, pengawasan, monitoring, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan;pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;

h) pelaksanaan tugas–tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya

Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban Dinas Kominfo dipimpin oleh Kepala Dinas yang dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh pejabat structural sebagaimana terdapat dalam struktur organisasi dibawah ini:

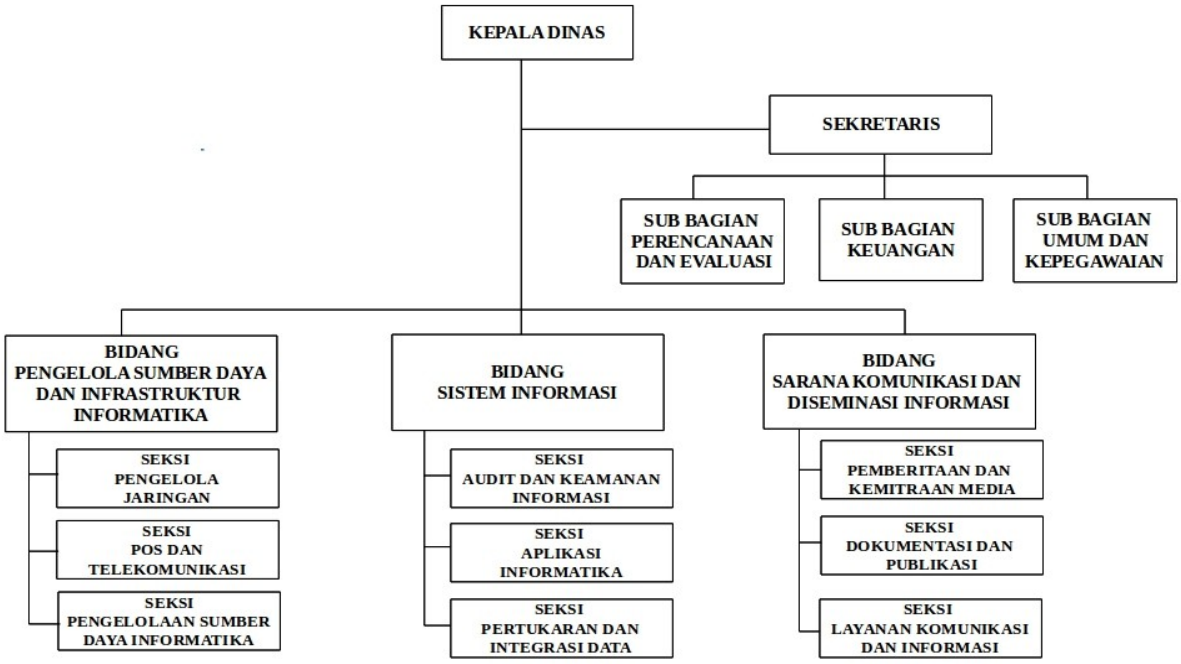

D. **Isu Strategis**

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD Kondisi atau gambaran umum daerah masa kini khususnya yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika yang akan datang yaitu;

a) Optimalisasi media komunikasi publik Pemda, hubungan media, koordinasi diseminasi dan pelayanan informasi antar OPD, dan kapasitas serta peran serta sumber daya komunikasi publik berbasis masyarakat.
b) Meningkatkan kualitas E-Literasi (Melek TIK) masyarakat dan peran serta komunitas dalam pemanfaatan dan pengembangan TIK, serta Kapasitas dan kelembagaan SDM Teknis Pengelola TIK (Infrastruktur Jaringan, DataCenter dan Aplikasi/ SIM) Pemerintah Kota Pekalongan.
c) Optimalisasi kinerja organisasi melalui penyusunan perencanaan, pengendalian, pelaporan dan pengendalian internal organisasi

3.2 Telahaan visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Dalam upaya mendukung terwujudnya visi dan misi Kota Pekalongan serta RPJMD Kota Pekalongan 2016-2021 Dinas Komunikasi dan Informatika melalui program dan kegiatan yang dilaksanakan berusaha untuk mencapai kondisi yang diinginkan, yaitu;

a) Telah meratanya informasi yang disampaikan oleh Pemerintah Kota Pekalongan kepada masyarakat sehingga dapat mengetahui dan memahami serta ikut serta dalam program pembangunan yang sedang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Pekalongan
b) Keberadaan sarana dan prasarana Komunikasi dan Informatika yang memadai sebagai pendukung pelaksanaan tugas pokok Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pekalongan Rencana Strategis 2016-2021 merupkan jembatan yang sangat strategis dalam memperlancar sasaran program.
c) Pengetahuan dan keterampilan masyarakat yang tinggi terhadap teknologi informasi sangat mendukung penyebaran informasi secara cepat kepada masyarakat.

E. Landasan Hukum

LKjIP Kota Pekalongan ini disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan NegaraYang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP};
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas LAKIP;
7. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 04 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota PekalonganTahun 2016 - 2021.

E. Sistematika

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kominfo Kota PekalonganTahun 2017 adalah :

BAB I PENDAHULUAN

Meliputi Gambaran Umum, Tugas dan Fungsi, Isu Strategis yang dihadapi SKPD, Dasar Hukum dan Sistematika.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Meliputi Perencanaan Strategis sebelum dan setelah reviu

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Meliputi Capaian IKU, Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja serta Akuntabilitas Keuangan

BAB IV PENUTUP

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Pada penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2016 ini, mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

2.1. Perencanaan Strategis Sebelum Reviu

A. Rencana Strategis

Rencana Strategis Dinas Kominfo Kota Pekalonganadalah merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistimatis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Daerah yang bersangkutan, dalam hal ini Rencana Strategis Dinas Kominfo. Kota Pekalongan yang ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu dari tahun 2016-2021 ditetapkan dengan Surat Keputusan Walikota Pekalongan Nomor : 053/082 Tahun 2016 tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pekalonga. Penetapan jangka waktu 5 tahun tersebut dihubungkan dengan pola pertanggung jawaban Walikota terkait dengan penetapan / kebijakan bahwa Rencana Strategis Dinas Kominfo Kota Pekalongan dibuat pada masa jabatannya, dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah daerah akan menjadi akuntabel.

Renstra Dinas Dinas Kominfo Kota Pekalongan tersebut ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota PekalonganTahun 2016-2021.

Penyusunan Renstra Dinas Kominfo Kota Pekalongantelah melalui tahapan - tahapan yang simultan dengan proses penyusunan RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2016-2021 dengan melibatkan *stakeholders* pada saat dilaksanakannya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD, Forum SKPD, sehingga Renstra Dinas .Kominfo Kota Pekalongan merupakan hasil kesepakatan bersama antara Dinas Kominfo Kota Pekalongan dan *stakeholder.*

Selanjutnya, Renstra Dinas Kominfo Kota Pekalongan tersebut akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Kominfo Kota Pekalongan yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Didalam Renja Dinas Kominfo Kota Pekalongan dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang.

1. Visi

Visi adalah gambaran kondisi ideal yang diinginkan pada masa mendatang oleh pimpinan dan seluruh staf Dinas Dinas Kominfo Kota Pekalongan. Visi tersebut mengandung makna bahwa Kota Pekalongan dengan potensi, keragaman dan kompleksitas masalah yang tinggi, harus mampu dibangun menuju Dinas Kominfo sebagai Kota Jasa yang Bermartabat serta Unggul, Nyaman dan Sejahtera, “Dinas Kominfo Juara”.

Visi Kota Pekalongan Tahun 2016-2021 adalah : “**TERWUJUDNYA KOTA PEKALONGAN YANG LEBIH SEJAHTERA, MANDIRI DAN BERBUDAYA BERLANDASKAN NILAI-NILAI RELIGIUSITAS”.**

2. Misi

Sedangkan untuk mewujudkan Visi Kota PekalonganTahun 2016-2021 tersebut diatas dilaksanakan Misi sebagai berikut :

1) Meningkatkan Akses dan Mutu Pendidikan;
2) Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik untuk sebesarbesarnya bagi kesejahteraan masyarakat;
3) Memberdayakan ekonomi rakyat berbasis potensi lokal berdasarkan prinsip pembangunan yang berkelanjutan;
4) Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana perkotaan yang ramah lingkungan;
5) Mengembangkan Teknologi Informasi berbasis komunitas; dan
6) Melestarikan budaya dan kearifan lokal serta mengemb

3. Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisa strategis.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Instansi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu / tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai Visi dan Misi Kota Pekalongan Tahun 2016-2021 sebanyak 10 sasaran strategis.

Sebagaimana visi dan misi yang telah ditetapkan, untuk keberhasilan tersebut perlu ditetapkan tujuan, sasaran berikut indicator dan target Dinas Kominfo. Kota Pekalongan sebagai berikut :

Tabel 2.1.

Tujuan, Sasaran, Indikator Dan Target Kinerja

Dinas Kominfo Kota Pekalongan

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA PADA TAHUN					
				2016	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
1	Meningkatkan efektifitas dan integrasi penyelenggaraan pelayanan publik berbasis TIK	Meningkatnya kualitas pelayanan publik berbasis teknologi informasi	Persentase Perangkat Daerah dan kelurahan yang membutuhkan pengembangan Sistem Komunikasi dan Website kepada masyarakat	0%	100 %	100 %	100 %	100 %	100%
2	Meningkatkan penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik dan Pelayanan Informasi	Meningkatnya desiminasi informasi dan keterbukaan informasi publik	Persentase Perangkat Daerah yang tercakup layanan pengelolaan komunikasi publik dan layanan saluran komunikasi publik LPPL	63%	65%	70%	80%	90%	100%
		Persentase Ketersediaan data	Jumlah jam layanan siaran Televisi lokal per hari	8	8	9	9	10	10

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA PADA TAHUN					
				2016	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
3	Meningkatnya pengembangan dan pemanfaatan insfrastruktur TIK serta layanan publik	Berfungsinya pengembangan dan pemanfaatan insfrastruktur TIK serta layanan publik	persentase Perangkat Daerah terfasilitasi fiber optik	63%	65%	70%	80%	90%	100%
4	Meningkatkan kapasitas masyarakat dalam pemanfaatan dan pengembangan teknologi informasi	Meningkatnya layanan pemerintah yang efektif berkualitas transparan dan akuntabel berbasis Teknologi informasi .	Persentase ketersediaan aplikasi SIM penunjang perencanaan, penganggaran, dan pelaporan keuangan daerah	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100%
5		Meningkatnya penggunaan teknologi informasi yang dikembangkan oleh komunitas untuk mewujudkan tata kehidupan masyarakat Kota Pekalongan Bersih, Aman, Tertib, Indah, dan Komunikatif.	Jumlah aplikasi komunitas yang digunakan masyarakat	2 aplikasi	4 aplikasi	6 aplikasi	8 aplikasi	10 aplikasi	12 aplikasi
6	Meningkatkan kapasitas masyarakat dalam pemanfaatan dan pengembangan teknologi informasi	Meningkatnya kualitas pelayanan data dan informasi didukung sarana dan prasarana yang memadai dan SDM profesional	Persentase kelurahan yang warga pelaku usaha ekonomi mendapatkan capacity building TIK untuk mendukung kegiatan sosial ekonomi,	0%	60%	70%	80%	90%	100%

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA PADA TAHUN					
				2016	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
7		Meningkatnya pemberdayaan masyarakat melalui jaringan komunikasi dan informatika	Persentase pengelola telecenter, LKK, dan karang taruna yang mendapatkan fasilitasi peningkatan kemampuan penggunaan TIK melalui Pelatihan/Workshop	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100%
8	Meningkatkan efektifitas dan integrasi penyelenggaraan pelayanan publik berbasis TIK	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	memudahkan dalam analisa perencanaan pembangunan.	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100%
9		Meningkatnya kualitas pelayanan publik berbasis teknologi informasi	menjamin konfidensialitas (kerahasiaan) berita/informasinya dalam sistem komunikasi yang umum dan terbuka itu.	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100%
10		Meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi pada Kantor Dinas Kominfo Kota Pekalongan	Persentase kelancaran pelaksanaan Tugas Fungsi pada Kantor Dinas Kominfo Kota Pekalongan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100%

B. Indikator Kinerja Utama.

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran

keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Pemerintah Kota Pekalongan telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk tingkat Pemerintah Daerah dan masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah melalui Keputusan WaliKota Pekalongan Nomor : 4 Tahun 2016 tentang Indikator Kinerja Utama RPJMD Kota Pekalongandan Indikator Kinerja Utama SKPD Tahun 2016-2021.

Adapun penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Kominfo Kota Pekalongan tahun 2016 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2.

Indikator Kinerja Utama

Dinas Kominfo Kota PekalonganTahun 2017

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN		
				ALASAN	FORMULASI / RUMUS PERITUNGAN	SUMBER DATA
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik berbasis teknologi informasi	Persentase Perangkat Daerah dan kelurahan yang membutuhkan pengembangan Sistem Komunikasi dan Website kepada masyarakat	persen	Tercapai sesuai target	∑ PD dan Kelurahan yg membutuhkan pengembangan Sim dan Website =---------- x 100 % ∑ PD dan Kelurahan yang difasilitasi pengembangan SIM dan website	APBD
2	Meningkatnya desiminasi informasi dan keterbukaan informasi publik	Persentase Perangkat Daerah yang tercakup layanan pengelolaan komunikasi publik dan layanan saluran komunikasi publik LPPL	Persen	Tercapai melebihi target	∑ Perangkat Daerah yang melayani pengelolaan dan saluran komunikasi publik =----------–---------- x 100% ∑Jumlah perangkat daerah yang ada	APBD
	Persentase Ketersediaan dat	Jumlah jam layanan siaran Televisi lokal per hari	Jam	Tercapai melebihi target	Jumlah jam layanan siaran TV Batik	APBD
3	Berfungsinya pengembangan dan pemanfaatan insfrastruktur TIK serta layanan publik	persentase Perangkat Daerah terfasilitasi fiber optik	persen	Tercapai sesuai target	∑ jaringan FO di Pemkot Pekalongan (thn n - thn (n-1)) = –---------- x 100 % ∑ Jaringan FO di Pemkot pada thn n-1	APBD
4	Meningkatnya layanan pemerintah	Persentase ketersediaan	persen		∑pengg SIM dlm pemerintahn (thn n - thn (n-1))	

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN		
				ALASAN	FORMULASI / RUMUS PERITUNGAN	SUMBER DATA
	yang efektif berkualitas transparan dan akuntabel berbasis Teknologi informasi .	aplikasi SIM penunjang perencanaan, penganggaran, dan pelaporan keuangan daerah			= ----------–----------x 100 % ∑ penggunaan SIM dlm pemerintahan tahun n-1	
5	Meningkatnya penggunaan teknologi informasi yang dikembangkan oleh komunitas untuk mewujudkan tata kehidupan masyarakat Kota Pekalongan Bersih, Aman, Tertib, Indah, dan Komunikatif.	Jumlah aplikasi komunitas yang digunakan masyarakat	aplikasi		∑ aplikasi komunitas digunakan masy	
6	Meningkatnya kualitas pelayanan data dan informasi didukung sarana dan prasarana yang memadai dan SDM profesional	Persentase kelurahan yang warga pelaku usaha ekonomi mendapatkan capacity building TIK untuk mendukung kegiatan sosial ekonomi,	persen		∑ kelurahan warganya yang mendapat capacity building TIK =----------x 100 % ∑ jumlah kelurahan di Kota Pekalongan	
7	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat melalui jaringan komunikasi dan informatika	Prosentase pengelola telecenter, LKK, dan karang taruna yang mendapatkan fasilitasi peningkatan kemampuan penggunaan TIK melalui Pelatihan/Workshop	persen		∑ telecenter aktif =----------x 100 % ∑ telecenter sekarang (2017 : 250)	
8	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	memudahkan dalam analisa perencanaan pembangunan.	persen		Prosentase perencanaan pembangunan didasarkan pada data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan	
9	Meningkatnya kualitas pelayanan publik berbasis teknologi informasi	menjamin konfidensialitas (kerahasiaan) berita/informasinya dalam sistem komunikasi yang umum dan terbuka.	persen		∑ informasi yang tersalurkan oleh bidang persandian dalam thn = –---------- x 100 % ∑ informasi yang terjaga kerahasiaannya	

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN		
				ALASAN	FORMULASI / RUMUS PERITUNGAN	SUMBER DATA
10	Meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi pada Kantor Dinas Kominfo Kota Pekalongan	Persentase kelancaran pelaksanaan Tugas Fungsi pada Kantor Dinas Kominfo Kota Pekalongan	Persen		Presentase Realisasi Kinerja =---------- x 100% Prosentase target Kinerja	

C. Perjanjian Kinerja 2017

Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencana kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Penyusunan Perjanjian Kinerja Dinas Kominfo Kota PekalonganTahun 2017 mengacu pada dokumen Renstra Dinas Kominfo Kota PekalonganTahun 2016-2021, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2017, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2017, dan dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2017. Dinas Kominfo Kota Pekalongantelah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2017 dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 2.3.

Perjanjian Kinerja Dinas Komindo **Kota Pekalongan**

Tahun 2017

No	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	Target
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik berbasis teknologi informasi	Persentase Perangkat Daerah dan kelurahan yang membutuhkan pengembangan Sistem Komunikasi dan Website kepada masyarakat	100%
2	Meningkatnya desiminasi informasi dan keterbukaan informasi publik	Persentase Perangkat Daerah yang tercakup layanan pengelolaan komunikasi publik dan layanan saluran komunikasi publik LPPL	65%
	Persentase Ketersediaan dat	Jumlah jam layanan siaran Televisi lokal per hari	8 jam

No	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	Target
3	Berfungsinya pengembangan dan pemanfaatan insfrastruktur TIK serta layanan publik	persentase Perangkat Daerah terfasilitasi fiber optik	65%
4	Meningkatnya layanan pemerintah yang efektif berkualitas transparan dan akuntabel berbasis Teknologi informasi .	Persentase ketersediaan aplikasi SIM penunjang perencanaan, penganggaran, dan pelaporan keuangan daerah	100%
5	Meningkatnya kualitas pelayanan publik berbasis teknologi informasi	Persentase Perangkat Daerah dan kelurahan yang membutuhkan pengembangan Sistem Komunikasi dan Website kepada masyarakat	4 aplikasi
6	Meningkatnya kualitas pelayanan data dan informasi didukung sarana dan prasarana yang memadai dan SDM profesional	Persentase kelurahan yang warga pelaku usaha ekonomi mendapatkan capacity building TIK untuk mendukung kegiatan sosial ekonomi,	60%
7	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat melalui jaringan komunikasi dan informatika	Prosentase pengelola telecenter, LKK, dan karang taruna yang mendapatkan fasilitasi peningkatan kemampuan penggunaan TIK melalui Pelatihan/Workshop	100%
8	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	memudahkan dalam analisa perencanaan pembangunan.	100%
9	Meningkatnya kualitas pelayanan publik berbasis teknologi informasi	menjamin konfidensialitas (kerahasiaan) berita/informasinya dalam sistem komunikasi yang umum dan terbuka itu.	100%`
10	Meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi pada Kantor Dinas Kominfo Kota Pekalongan	Persentase kelancaran pelaksanaan Tugas Fungsi pada Kantor Dinas Kominfo Kota Pekalongan	100%

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp.	1.059.535.000
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp.	478.593.000
Program peningkatan peng.sistem pelaporan capaian kin& keuangan	Rp.	38.000.000
Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat (PPPM)	Rp.	46.007.000
Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Rp.	3.555.260.000
Program Pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi	Rp	52.500.000
Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi	Rp.	100.000.000
Program kerjasama informasi dengan mas media	Rp.	382.000.000
Program Pengembangan Infrastruktur TIK	Rp.	1.746.900.000
ProgramOptimalisasi Penguatan teknologi informasi	Rp.	1.290.500.000
Program Pengembangan data/informasi statistik informasi	Rp.	275.000.000
Program penyelenggaraan persandian untuk pengamanan	Rp.	40.000.000
Jumlah	Rp.	9.064.295.000

2.2. Perencanaan Strategis Hasil Reviu

Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Pemerintah Kota Pekalongan juga melakukan reviu terhadap RPJMD baru sekaligus menerapkan cascading supaya terarah dan runtut sesuai jabatan diawali dengan tujuan dan sasaran (yang dimiliki oleh Kepala atau Eselon II) kemudian dijabarkan runtut sesuai dalam program (oleh Kepala Bidang atau Eselon III) dan dijabarkan ke kegiatan (oleh PPTK atau Eselon IV dst) semua permusuhan harus dijabarkan dan dipasang target dan laporan capaian dilaporkan.

Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja Dinas dilakukan reviu terhadap Perencanaan Strategis, Indikator Kinerja Utama dan Perjanjian Kinerja Dinas yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Pekalongandengan narasumber dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Hasil reviu tersebut selanjutnya menjadi dasar penyusunan Laporan akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kominfo Tahun 2017 sebagai berikut :

A. Rencana Strategis Hasil Reviu

Hasil reviu pada rencana strategis Dinas terutama merevisi indicator kinerja pada seluruh sasaran, selain bertambahnya jumlah indicator juga merevisi penempatan indicator kinerja strategis menjadi lebih menggambarkan keberhasilan tujuan dan atau sasaran. Hasil reviu selanjutnya menjadi lembar kerja tambahan pada Rencana Strategis Dinas Kominfo Kota Pekalongan Tahun 2016-2021.

Beberapa catatan dan rekomendasi yang diperoleh dalam pelaksanaan reviu Rencana strategis Dinas di lingkungan Pemerintah Kota Pekalonganantara lain :

1. **Rekomendasi Bappeda** Kota Pekalongan
   - Dalam menyusun LKJIP dan Renstra disarankan untuk membuat tabel panjang sebagai dasar penyusunan target dan laporan kinerja OPD.
   - Tabel panjang berisi Tujuan Sasaran Indikator dan Target Pencapaian Misi RPJMD harus valid dan bisa menjadi pedoman penyusunan LKJIP selanjutnya.
   - Setiap Tujuan, Sasaran dan Program sesuai dengan urutan hirarki tidak boleh menyebar harus mengkrucut sesuai kapasitas jabatan.

- Setiap Tujuan, Sasaran dan Program ada Indikator masing-masing yang tidak boleh sama karena sesuai urutan indikator tujuan mencakup bisa lebih dari satu sasaran bergitu pula indikator sasaran bisa lebih dari satu indikator program sehingga membentu kerucut
- Tujuan dan Sasaran merupakan indikator Kepala OPD
- Program merupakan indikator Bidang dan Sekretaris
- Program merupakan indikator PPTK.

2. Rekomendasi Inspektorat Kota Pekalongan
   - LKJIP berpedoman dengan IKU (Indikator Kinerja Utama)
   - Capaian Kinerja dan penyerapan anggaran mempengaruhi penilaian LKJIP
   - Maturitas merupakan unsur penilaian sehingga harus diterapkan dan target capaian kinerja merupakan beban yang dipertanggungjawabkan.
   - Penjabaran pencapaian dimulai dari target sasaran yang dicapai dilanjutkan dengan program dan pencapaiannya serta penjelasan rinci dari masing-masing kegiatan.

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Dinas Kominfo Kota Pekalonganselaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Kominfo Kota Pekalonganyang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pecapaian target masing-masing indikator sasaran srategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2016-2021 maupun Rencana Kerja Tahun 2016. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan misi dan visi Dinas Kominfo.

A. Kerangka Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.

Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya

masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.

Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, sebagai berikut :

Persentase	Predikat	Kode Warna
< 100%	Tidak Tercapai	
= 100%	Tercapai/ Sesuai Target	
> 100%	Melebihi Target	

Dan predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja yang tidak tercapai (< 100%) dengan pendekatan Permendagri nomor 54 Tahun 2010, sebagai berikut

Pencapaian Kinerja Sasaran Dinas Kominfo Kota Pekalongan

Tahun 2016

NO.	Kategori	Rata-Rata % Capaian	Kode Warna
1	Sangat Baik	> 90	
2	Baik	75.00 – 89.99	
3	Cukup	65.00 – 74.99	
4	Kurang	50.00 – 64.99	
5	Sangat Kurang	0 – 49.99	

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Dalam laporan ini, Dinas Kominfo Kota Pekalongan dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indicator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2016-2021 maupun Rencana Kerja Tahun 2016. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan

dalam mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja SKPD Tahun 2017 hasil reviu dan Indikator Kinerja Utama SKPD berdasarkan Keputusan WaliKota Pekalongan Nomor : 4 Tahun 2016, telah ditetapkan 4 (empat) sasaran dengan 9 (sembilan) indikator kinerja (out comes) dengan rincian sebagai berikut :

- Sasaran 1terdiri dari 1 indikator
- Sasaran 2terdiri dari 2 indikator
- Sasaran 3terdiri dari 1 indikator
- Sasaran 4terdiri dari 1 indikator
- Sasaran 5terdiri dari 1 indikator
- Sasaran 6terdiri dari 1 indikator
- Sasaran 7terdiri dari 1 indikator
- Sasaran 8terdiri dari 1 indikator
- Sasaran 9terdiri dari 1 indikator
- Sasaran 10 terdiri dari 1 indikator

B. Capaian Indikator Kinerja Utama

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah *perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU).* Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dinas Kominfo Kota Pekalongantelah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk Satuan Kerja Perangkat Daerah melalui Keputusan WaliKota Pekalongan Nomor : 4 Tahun 2016 tentang Indikator Kinerja Utama RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2016-2021. Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Dinas Kominfo Kota Pekalongan juga melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, dalam melakukan reviu dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi. Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Dinas Kominfo Kota Pekalongantahun 2016 menunjukan hasil sebagai berikut:

Tabel **3.1.**

Capaian Indikator Kinerja Utama

Dinas Kominfo **Kota Pekalongan**

Tahun 2017

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian	Keterangan
1.	Persentase Perangkat Daerah dan kelurahan yang membutuhkan pengembangan Sistem Komunikasi dan Website kepada masyarakat	persen	100	83.58	tercapai	
2.	Persentase Perangkat Daerah yang tercakup layanan pengelolaan komunikasi publik dan layanan saluran komunikasi publik LPPL	persen	65	62.34	tercapai	
3.	Jumlah jam layanan siaran Televisi lokal per hari	jam	8	8	Tercapai	
4	persentase Perangkat Daerah terfasilitasi fiber optik	persen	65	59.88	Tidak tercapai	
5	Persentase ketersediaan aplikasi SIM penunjang perencanaan, penganggaran, dan pelaporan keuangan daerah	persen	100	100	tercapai	
6	Jumlah aplikasi komunitas yang digunakan masyarakat	aplikasi	4	4	tercapai	
7	Persentase kelurahan yang warga pelaku usaha ekonomi mendapatkan capacity building TIK untuk mendukung kegiatan sosial ekonomi,	persen	60	62.50	tercapai	
8	Prosentase pengelola telecenter, LKK, dan karang taruna yang mendapatkan fasilitasi peningkatan kemampuan penggunaan TIK melalui Pelatihan/Workshop	persen	100	91.94	tercapai	
9	memudahkan dalam analisa perencanaan pembangunan.	persen	100	100	tercapai	
10	menjamin konfidensialitas (kerahasiaan) berita/informasinya dalam sistem komunikasi yang umum dan terbuka itu.	persen	100`	100	tercapai	

11	Persentase kelancaran pelaksanaan Tugas Fungsi pada Kantor Dinas Kominfo Kota Pekalongan	persen	100	100	tercapai	

Penjelasan

1. Persentase PD dan Kelurahan yang melakukan pengembangan Sistem Komunikasi dan website kepada masyarakat. Target 68 unit kerja dan tercapai 56 unit kerja sehingga prosentase pencapaian 83,82%, dari :

Unit kerja	Target	Capaian
Pekalongankota (domain)	1	1
Kelurahan	27	27
Kecamatan	4	4
Bagian	9	4
Dinas	17	12
Kantor	1	0
Inspektorat	1	1
RSUD	1	1
Satuan	3	3
Jumlah	68	56

2. Persentase Perangkat Daerah yang tercakup layanan pengelolaan komunikasi publik dan layanan saluran komunikasi publik LPPL. Dengan target 47 (SKPD : 77 tercapai 62.33% sehingga belum tercapai dikarenakan bentuk layanan Kecamatan dan Kelurahan mempunyai persamaan sehingga tidak secara langsung terlibat dalam LPPL dikarenakan ada berita menyangkut warga sekitar Kelurahan dan Kecamatan terdekat.
3. Jumlah jam layanan siaran TV Batik setiap hari dengan target 8 jam dari jam 13.00 WIB s/d 21.00 WIB, sehingga tercapai
4. persentase Perangkat Daerah terfasilitasi fiber optik sesuai dengan target dalam RPJMD untuk Tahun 2017 adalah sebesar 65% dengan capaian saat ini sebesar 54,06%, sehingga target belum tercapai.

Unit Kerja	Jumlah Awal	Tahun 2017	Total capai	Target	Capaian
	(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(3x100):(4)
Sekolah	15	16	31	100	
Kelurahan	18	2	20	27	
Puskesmas	8	5	13	14	
SKPD/Kecamatan	29	-	29	31	

Jumlah	70	23	93	172	54,06%

5. Persentase ketersediaan aplikasi SIM penunjang perencanaan, penganggaran, dan pelaporan keuangan daerah hal ini tercapai karena terbukti sesuai denganperilaku yang berlaku bahwa aplikasi simkeu.pekalongankota.go.id terlaksana bahkan sampai dengan ke Kelurahan

6. Jumlah aplikasi komunitas yang digunakan masyarakat telah tercapai 4 aplikasi diantaranya :

   Jumlah aplikasi yang dikembangkan bersama komunitas dalam mengatasi permasalahan dan mendorong inovasi kreativitas. Hal ini tercapai dari target 4 aplikasi tercapai 5 aplikasi yang bisa didownload lewat https://play.google.com/, aplikasi tersebut :

   1. Aplikasi explore kota pekalongan.
   2. Aplikasi PPID Kota PEkalongan
   3. e-kliping.pekalongankota.go.id
   4. e-suratonline.pekalongankota.go.id
   5. wadulo

7. Persentase Kelurahan yang warga pelaku usaha ekonomi mendapatkan capacity building TIK untukmendukung kegiatan sosial ekonomi. Dari target 100% telah tercapai 100% terdiri dari dari 10 Kelompok yang dilatih e-bisnis, diantaranya

   1. Himpaudi,
   2. MI pringlangu
   3. SMK IN
   4. Ikatan Wanita Pengusaha Muslim
   5. Ikatan Wanita Pengusaha
   6. Arah
   7. Relawan TIK
   8. Open Source
   9. Kelurahan

8. Persentase pengelola telecenter, LKK dan karang taruna yang mendapatkan fasilitasi peningkatan kemampuan penggunaan TIK melalui pelatihan/workshop dari sebanyak 228 peserta dari telecenter sudah semua pernah pelatihan.
9. Persentase arus informasi pemerintah daerah yang lancar, aman dan terjaga kerahasiaannya. Adapun hasil kinerja selama pekerjaan tidak ada kendala terutama masalah persandian maka hasil 100%
10. Persentase kelancaran pelaksanaan Tugas Fungsi pada Kantor Dinas Kominfo Kota Pekalongan

C. Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis

Secara umum Dinas Kominfo Kota Pekalongan telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra 2016-2021. Jumlah Sasaran Strategis yang ditetapkan untuk mencapai visi dan misi Kota Pekalongan Tahun 2016-2021 sebanyak 2 sasaran. Tahun 2017 adalah tahun kedua pelaksanaan Rencana Strategis, dari 2 (dua) sasaran strategis dengan 2 (dua*)* indikator kinerja yang ditetapkan maka pencapaian kinerja sasaran Startegis Dinas Kominfo Kota Pekalongan adalah sebagai berikut:

Tabel **3.2**

Capaian Indikator Kinerja Kota Pekalongan

Tahun 2017

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %
7	10. Persentase Perangkat Daerah / Badan Publik yang memberikan kemudahan akses pelayanan melalui penerapan keterbukaan infomrasi Publik (KIP)	Persen	60	83,58	83,58% (Tersedianya akses dan kualitas informasi publik terkait kebijakan dan program prioritas pemerintah yang baik, cepat, tepat dan obyektif kepada seluruh lapisan masyarakat Indonesia)
25	33. Cakupan kelompok masyarakat yang mampu memanfaatan teknologi informasi	Kelompok	10	10	100% (Meningkatnya peran Pengembangan SDM dalam meningkatkan keahlian dan kompetensi SDM Bidang Komunikasi dan Informatika)

Berdasarkan pengukuran kinerja tersebut di atas dapat diperoleh data dan informasi kinerja Dinas pada beberapa table berikut :

Tabel **3.3**

Pencapaian Kinerja Sasaran

Dinas Kominfo Kota PekalonganTahun 2017

NO.	SASARAN STRATEGIS	CAPAIAN
1	Melebihi/Melampaui Target	1 sasaran
2	Sesuai Target	1 sasaran
3	Kurang Target	

Adapun pencapaian kinerja sasaran dirinci dalam tabel, sebagai berikut:

Dari 2 (dua) kinerja Sasaran diatas, pencapaian target yang sudah ditetapkan sebagai berikut:

Tabel **3.4**

Pencapaian target Misi

No.	Misi	Jumlah Indikator Sasaran	Tingkat Pencapaian					
			Melampaui target (>100%)		Sesuai Target (100%)		Belum Mencapai Target (<100%)	
			Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
1	Misi 1	1			1	83.58		
2	Misi 2	1			1	100.00		

Dari 2 sasaran dengan 2 indikator kinerja, pencapaian kinerja Dinas Kominfo Kota Pekalongan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.5

Kategori Pencapaian Indikator Sasaran

No.	Kategori	Jumlah Indikator	Presentase
A.	**Misi 1**		
1	Melebihi/Melampaui Target	1	83,58%
2	Sesuai Target		
3	Tidak Mencapai Target		
B.	**Misi 2**		
1	Melebihi/Melampaui Target		
2	Sesuai Target	**1**	**100,00%**
3	Tidak Mencapai Target		

Evaluasi bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian misi, agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang. Selain itu, dalam evaluasi kinerja dilakukan pula analisis.

Dalam melakukan evaluasi kinerja, perlu juga digunakan pembandingan-pembandingan antara lain :

Dalam yang direncanakan.

- kinerja nyata dengan kinerja tahun-tahun sebelumnya.
- Kinerja nyata dengan target akhir resntra.
- kinerja suatu instansi dengan kinerja instansi lain yang unggul di bidangnya ataupun dengan kinerja sektor swasta.
- kinerja nyata dengan kinerja di instansi lain atau dengan standar nasional.

Selanjutnya pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja yang telah dicapai pada tahun 2017 dan membandingkan antara target dan realisasi pada indikator sasaran dari 2 sasaran dan 2 indikator kinerja dari 2 Misi, sebagaimana telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Kominfo Kota Pekalongantahun 2016-2021, analisis pencapaian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan secara rinci dapat dilihat sebagai berikut :

Sasaran 1
Meningkatnya kualitas pelayanan publik berbasis teknologi informasi

Pencapaian sasaran 1 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel 3.2.
Analisis Pencapaian Sasaran 1
Meningkatnya layanan informasi publik berbasis teknologi informasi

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2017		%	Tahun 2016	%
			Target	Realisasi		Realisasi	
1	Persentase Perangkat Daerah/Badan Publik yang memberikan kemudahan akses pelayanan melalui penerapan Keterbukaan Informasi Publik (KIP)	Nilai	60	83,58	100	62.50	100
Rata-rata Capaian Kinerja							

Sasaran meningkatnya kualitas pelayanan publik berbasis teknologi informasi dapat dilihat dari 1 (satu) indicator : Persentase Perangkat Daerah/Badan Publik yang memberikan kemudahan akses pelayanan melalui penerapan Keterbukaan Informasi Publik (KIP)

Berdasarkan dari tabel diatas, dapat diketahui bahwa Dinas Komunikasi dan Informatika dalam melaksanakan capaian kinerja tahun 2017 cukup berhasil karena adanya 2 pengharagaan dari Komisi Informasi Jawa Tengah, diantaranya :

"Badan Publik Inovatif Tingkat Jawa Tengah" Peringkat I Jawa Tengah

"Badan Publik Terbuka dan Inovatif" Peringkat I jawa tengah

Capaian kinerja nyata indikator Indeks Persentase Perangkat Daerah/Badan Publik yang memberikan kemudahan akses pelayanan melalui penerapan adalah sebesar 100% dari target sebesar 60% yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2017, sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 100% atau melebihii target yang diperjanjikan. Capaian ini lebih baik dari capaian tahun sebelumnya yaitu 62,50% Point.

Tahun 2017 adalah tahun kedua renstra, capaian tahun 2017 sebesar 100% bila dibandingkan dengan target akhir renstra Dinas maka capaian kinerjanya mencapa 60%. Data penunjang capaian kinerja indicator meningkatnya kualitas pelayanan publik berbasis Teknologi Infirmasi yang diperoleh dari Kabid Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Sebagaimana table berikut :

Data sebelum desk

No	Badan Publik	Skor	Keterangan
1	Dinkominfo	719	Tinggi
2	DPM PTSP	714	Tinggi
3	Dinarpus	634	Tinggi
4	Dinkes	562	Sedang
5	DKP	550	Sedang
6	Kec.Pekl Selatan	544	Sedang
7	Dindagkop UMKM	544	Sedang

Setelah Desk

No	Badan Publik	Skor	Keterangan
1	Dinkominfo	719	Tinggi
2	DPM PTSP	714	Tinggi
3	Dinperkim	700	Tinggi
4	Dinaspus	634	Tinggi
5	Minbang	599	Sedang
6	Dinkes	562	Sedang
7	DKP	550	Sedang

8	Dindukcapil	544	Sedang	8	Kec.Pkl Barat	549	Sedang
9	Bappeda	524	Sedang	9	Kec.Pkl Selatan	544	Sedang
10	Humas	519	Sedang	10	Dindagkop UMKM	544	Sedang
11	Dinparbudpora	512	Sedang	11	Kec.Pkl Timur	535	Sedang
12	Kec.Pkl Barat	503	Sedang	12	Kesbangpol	534	Sedang
13	RSUD BEndan	469	Sedang	13	BPR BKK	531	Sedang
14	Satpol PP	464	Sedang	14	Dindukcapil	524	Sedang
15	DPMPPA	454	Sedang	15	Bappeda	519	Sedang
16	DPUPR	454	Sedang	16	Humas	512	Sedang
17	Dinsos	445	Sedang	17	Dinparbudpora	503	Sedang
18	BKPPD	444	Sedang	18	Hukum	496	Sedang
19	BPBD	444	Sedang	19	RT dan Perleng	495	Sedang
20	Dindik	444	Sedang	20	Dinhub	479	Sedang
21	Kesra	434	Sedang	21	RSUD BEndan	464	Sedang
22	Perekonomian	424	Sedang	22	BKK Utara	464	Sedang
23	Organsiasi	424	Sedang	23	Dinperinaker	459	Sedang
24	Kesbangpol	404	Sangat Rendah	24	Satpol	454	Sedang
25	Dinperpa	394	Sangat Rendah	25	DPMPPA	454	Sedang
26	RT danPErlengk	383	Sangat Rendah	26	DPUPR	445	Sedang
27	Setwan	364	Sangat Rendah	27	Dinsos	444	Sedang
28	Dinperinaker	349	Sangat Rendah	28	BKPPD	444	Sedang
29	Minbang	349	Sangat Rendah	29	BPBD	444	Sedang
30	Dinperkim	320	Sangat Rendah	30	DLH	442	Sedang
31	Umum	299	Sangat Rendah	31	Umum	439	Sedang
32	BPR BKK	268	Sangat Rendah	32	Tapem	439	Sedang
33	DLH	267	Sangat Rendah	33	Dindik	434	Sedang
34	Hukum	264	Sangat Rendah	34	Bank PEkalongan	429	Sedang
35	Kec.Pkl Timur	190	Sangat Rendah	35	Kec.Pkl Utara	429	Sedang
36	BKD	155	Sangat Rendah	36	Kesra	424	Sedang
37	Tapem	150	Sangat Rendah	37	Perekonomian	424	Sedang
38	BKK Utara	137	Sangat Rendah	38	Organisasi	424	Sedang

39	PDAM	110	Sangat Rendah	39	Dinperpa	409	rendah
40	Bank Pekalongan	100	Sangat Rendah	40	Setwan	404	rendah
41	BLUD Puskesmas	0	Sangat Rendah	41	BKD	289	rendah
42	Kec.Pkl UTara	0	Sangat Rendah	42	PDAM	110	Sangat rendah
43	Dinhub	0	Sangat Rendah	43	Blud Puskesmas	0	

Capaian pemeringkatan pelayanan keterbukaan informasi publik

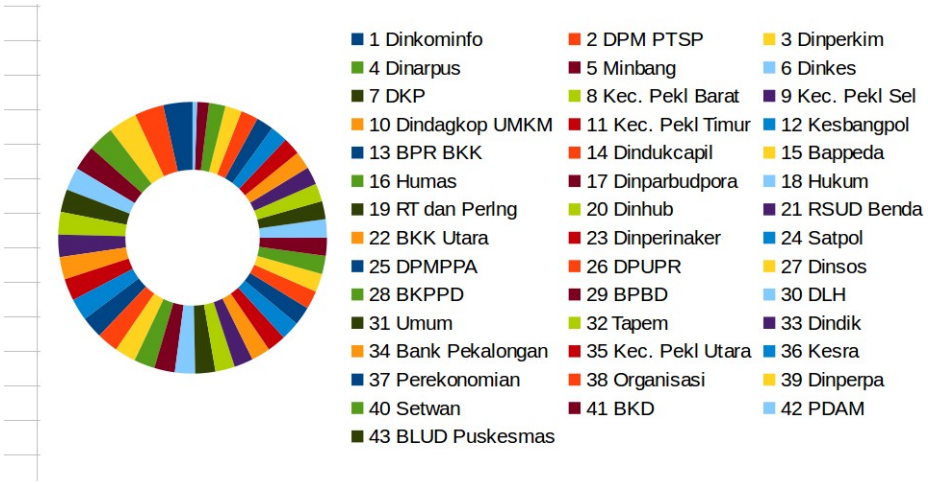

Capaian kinerja sasaran 1 tentang Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik didukung oleh program **Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa** dengan kegiatan Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi, Perencanaan dan pengembangan kebijakan komunikasi dan informasi, Pelayanan Desiminasi Informasi dan Komunikasi Kebijakan Perencanaan Pusat dan Daerah (Operasional Mobil Pustika), Identifikasi dan Analisis Teknologi Masyarakat (SIDa), Pembinaan dan pengembangan kelembagaan komunikasi dan informasi masyarakat, Peningkatan kapasitas layanan komunikasi dan informasi publikPenyelenggaraan LPP Radio Kota Batik, Penyelenggaraan LPP Batik TV, Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik, Pengelolaan Call Center 112 Output program dan kegiatan tersebut antara lain .Jumlah jam layanan siaran per hari : Jumlah penyelenggaraan kegiatan desiminasi informasi bagi masyarakat / lembaga, Jumlah penyelenggaraan Forum Komunikasi Desiminasi Informasi Publik antar OPD dalam satu tahun, Jumlah desiminasi

informasi dan komunikasi melalui mobil pustika, Jumlah dokumentasi inovasi / event strategis, Jumlah Sosialisasi dari Workshop KElompok Informasi Masyarakat, Jumlah kegiatan forum komunikasi, Jumlah kegiatan penyelenggaraan SDM RKB Radio selama 1 tahun, Jumlah SDM Batik TV dalam pemberdayaan media audio visual selama 1 tahun, Jumlah episode yang diproduksi oleh LPPL batik TV, Jumlah Workshop/Capacity Building KIP , Jumlah penyelenggaraan festival anggaran (pameran KIP), Jumlah buku pedoman Tat Kelola Layanan Call Center 112, Jumlah bulan yang tercakup dalam penyelenggaraan layanan Call Center dalam 1 tahun, TErsedianya Pedoman/Tata kelola layanan Call Center 112, Jumlah kajian bidang informasi dan komunikasi dimana output tersebut menunjang / kurang menunjang pencapaian kinerja sasaran.

Gambaran tentang program, kegiatan, pagu, realisasi anggaran, output serta dampak terhadap capaian kinerja dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.3

Program, kegiatan, anggaran dan Output yang dihasilkan

No	Program	Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Output	Menujang/ Kurang
1.	**Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa**	Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi	51900000	51.615.000	Jumlah siaran TV Batik	menunjang
2		Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi	96500000	78.620.000	Jumlah penyeleng-garaan kegiatan desiminasi infor-masi bagi masya-rakat / lembaga,	menunjang
3		Perencanaan dan pengembangan kebijakan komunikasi dan informasi	56000000	52.650.000	Jumlah penyeleng-garaan Forum Ko-munikasi Desimi-nasi Informasi Publik antar OPD dalam satu tahun,	menunjang
4		Pelayanan Desi-minasi Informasi dan Komunikasi Kebijakan Peren-canaan Pusat dan Daerah (Operasio-nal Mobil Pustika)	45000000	44.290.000	Jumlah desiminasi informasi dan komunikasi melalui mobil pustika	menunjang

No	Program	Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Output	Menujang / Kurang
5		Identifikasi dan Analisis Teknologi Masyarakat (SIDa)	50000000	48.395.000	Jumlah dokumentasi inovasi/ event strategis,	menunjang
6		Pembinaan dan pengembangan kelembagaan komunikasi dan informasi masyarakat	50000000	47.160.466	Jumlah Sosialisasi dari Workshop KElompok Informasi Masyarakat,	menunjang
7		Peningkatan kapasitas layanan komunikasi dan informasi publik	50000000	48.395.000	Jumlah kegiatan forum komunikasi,	Sangat menunjang
8		Penyelenggaraan LPP Radio Kota Batik	532000000	442.411.658	Jumlah kegiatan penyelenggaraan SDM RKB Radio selama 1 tahun,	menunjang
9		Penyelenggaraan LPP Batik TV	1406000000	1.373.741.528	Jumlah SDM Batik TV dalam pemberdayaan media audio visual selama 1 tahun,	menunjang
10		Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik	100000000	98.922.500	Jumlah Workshop/ Capacity Building KIP , Jumlah penyelenggaraan festival anggaran (pameran KIP),	Sangat menunjang
11		Pengelolaan Call Center 112	75000000	34.464.500	Jumlah buku pedoman Tat Kelola Layanan Call Center 112, Jumlah bulan yang tercakup dalam penyelenggaraan layanan Call Center dalam 1 tahun, TErsedianya Pedoman/Tata kelola layanan Call Center 112, Jumlah kajian bidang informasi	Belum menunjang

					dan komunikasi	

Sasaran meningkatnya kualitas pelayanan publik dapat dilihat dari 1 (satu) indicator : Persentase Perangkat Daerah/Badan Publik yang memberikan kemudahan akses pelayanan melalui penerapan Keterbukaan Informasi Publik (KIP)

Capaian kinerja nyata indikator Indeks Persentase Perangkat Daerah/Badan Publik yang memberikan kemudahan akses pelayanan melalui penerapan adalah sebesar 100 % dari target sebesar 60% yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2017, sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 100% atau melebihii target yang diperjanjikan. Capaian ini lebih baik dari capaian tahun sebelumnya yaitu 62,50% Point.

Keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja sasaran disebabkan faktor pendukung dan penghambat sebagai berikut :

Faktor pendukung :

1. Dukungan Kepala Daerah selaku pemegang kekuasaaan umum dan kebijakan daerah
2. Kepala Perangkat Daerah yang merupakan penyedia informasi yang ikut mendukung dalam ketercapaian prestasi ini.
3. Sumber dana yang cukup karena telah terlaksanakanya penyelenggaraan keterbukaan informasi publik
4. Sumber daya manusia yang dilengkapi dengan fasilitasi teknologi informasi dalam penyelenggaraan ketebukaan informasi publik lewat website ppip.pekalongankota.go.id; tapd.pekalongankota.go.id; pekalongankota.go.id
5. Dengan mengadakan desk bagi OPD selaku penyedia infromasi dengan data sebelum di desk dan setelah di desk sebagai berikut :

Faktor Penghambat

Capaian Kinerja, karena kelangsungan penyelenggaraan ini secara terus menerus berkesinambungan berjalan seiring dengan permintaan informasi dan data yang wajib disediakan, diantaranya :

1. Konstributor data informasi (OPD) tidak secara langsung bisa memberikan data secara otomatis setiap tahunnya.
2. Surat edaran permohonan informasi harus dimonitor/dievaluasi keberadaannya

karena masih ada yang terlupakan.

Solusi mengatasi faktor penghambat :

1. Petugas Pelayanan informasi PPID banyak berkoordinasi dengan OPD selaku penyedia informasi
2. petugas Pelayanan informasi PPID harus memonitor dan mengevaluasi terkait edaran permohonan informasi

Untuk mengetahui tingkat efektifitas dan efisiensi atas capaian kinerja sasaran meningkatnya kualitas pelayanan publik, dibandingkan dengan realisasi anggaran sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.4.

Tingkat Efektifitas dan Efisiensi Kinerja

Sasaran meningkatnya kualitas pelayanan publik berbasis teknologi informasi

No	Sasaran	Indikator		Satuan	Kinerja			Keuangan			
					Target	Realisasi	(%)	Program	Pagu	Realisasi	%
1	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah	1.1	Persentase Perangkat Daerah / Badan Publik yang memberikan kemudahan akses pelayanan melalui penerapan keterbukaan infomrasi Publik (KIP)	Persen	60	100	1	**Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa**	2.460.500.000	2.269.368.652	92.23
		RATA-RATA CAPAIAN DARI 3 INDIKATOR					**100**	**TOTAL PER SASARAN**	2.460.500.000	2.269.368.652	92.23
TINGKAT EFISIENSI 7.76 %											
TINGKAT EFEKTIFITAS 92.23 %											

Untuk meningkatkan capaian kinerja sasaran Meningkatnya kualitas pelayanan publik, berdasarkan hasil evaluasi dan analisis tersebut diatas, maka dimasa yang akan datang direkomendasikan/solusi perbaikan sebagai berikut :

1. sasaran pelayanan publik dengan pengertian segala kegiatan pemerintah daerah di publikasi dan apabila ada yang memohn informasi ditindaklanjuti sesuai SOP yang telah ada, sehingga hal ini menangani data saja belum tindakan.
2. Untuk peningkatan pelayanan publik yang sesuagguhnya tahun mendatang akan di tambah indikator strategis mengarah ke penanganan pengaduan yang melibatkan Tim Kota yang mana gedung Command Center sudah dibangun dan tindaklanjut yang efektif tahun 2019.

Sasaran 2
Cakupan kelompok masyarakat yang mampu memanfaatkan teknologi informasi

Pencapaian sasaran 2 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel 3.5.
Analisis Pencapaian Sasaran 2

Meningkatnya kemampuan masyarakat dalam pemanfaatan teknologi informasi sebagai salah satu upaya pemberdayaan masyarakat

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2017		%	Tahun 2018	%
			Target	Realisasi		Target	
1	Cakupan Kelompok masyarakat yang mampu memanfaatkan teknologi informasi	Nilai	10	10	100	5	100
Rata-rata Capaian Kinerja			10	10	100	5	100

Sasaran meningkatnya kemampuan masyarakat dalam pemanfaatan teknologi informasi sebagai salah satu upaya pemberdayaan masyarakat telah telah terlaksana dari 10 kelompok masyarakat yang mampu TIK diantaranya :

1. Himpaudi
2. MI pringlangu
3. SMK IN

4. Ikatan Wanita Pengusaha Muslim
5. Ikatan Wanita Pengusaha
6. Arah
7. Relawan TIK
8. Open Source
9. Kelurahan
I0. Kecamatan

Capaian kinerja nyata indicator tercapai 10 kelompok dari target 10 kelompok yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2017, sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 100% atau sesuai target yang diperjanjikan. Capaian ini lebih baik dari capaian tahun sebelumnya belum ditargetkan.

Tahun 2017 adalah tahun kedua renstra, capaian tahun 2017 sebesar 100% bila dibandingkan dengan target akhir renstra Dinas maka capaian kinerjanya mencapai 100% sebanyak 30 kelompok. Sebagaimana table berikut :

Capaian kinerja sasaran strategis di dukung oleh program **Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Infromasi** dengan kegiatan Pelatihan SDM dalam Bidang Komunikasi dan Informasi. Output program dan kegiatan tersebut antara lain, Gambaran tentang program, kegiatan, pagu, realisasi anggaran, output serta dampak terhadap capaian kinerja dapat dilihat pada tabel berikut :

No	Program	Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Output	Dampak Baik/Kurang
1.	Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi & Infromasi		100.000.000	98.550.800		
		Pelatihan SDM dalam Bidang Komunikasi dan Informasi	100.000.000	98.550.800	Jumlahpeserta pelatihan untuk meningkatkan e-literacy masyarakat dan professio-nalisme SDM masyarakat danb aparatur	Baik

Keberhasilan pencapaian kinerja sasaran Pelatihan SDM dalam Bidang Komunikasi dan Informasi disebabkan faktor pendukung dan penghambat sebagai berikut :

Faktor pendukung :

1. Dukungan Kebijakan dalam Misi ke 5 “Mengembangkan IT (Information Technology) berbasis komunitas”
2. Tersedianya Laboratorium BLC (Broadband Learning Center) sebagai sarana pembelajaran IT secara gratis pada masyarakat
3. Tersediannya anggaran Pelatihan SDM “Pelatihan SDM dalam Bidang Komunikasi dan Informasi”
4. Kerjasama dengan komunitas IT (Relawan TIK, Dewan TIK, Puskomas, MGMP TIK, Komunitas Animasi, Komunitas Blogger, Komunitas Fotografi (INSTA))

.Tabel 3.6

Analisis Pencapaian Sasaran 2
Meningkatnya kemampuan masyarakat dalam pemanfaatan teknologi informasi sebagai salah satu upaya pemberdayaan masyarakat

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2017		%	Tahun 2016	%
			Target	Realisasi		Realisasi	
1	Cakupan kelompok masyarakat yang mampu memanfaatan teknologi informasi	Kelompok	10	10	100	62.50	100
Rata-rata Capaian Kinerja							

5. Capaian kinerja indicator 10 kelompok sebesar 100% sama dari capaian rata rata Kota Pekalongan, dan bila dibandingkan dengan Dinas Kominfo Capaian tersebut sama.
6. Capaian kinerja sasaran strategis di duku

Faktor Penghambat

1. meskipun sudah pernah dilatih apabila tidak diterapkan ataupun diuji coba terus menerus akan terlupakan.

Untuk mengetahui tingkat efektifitas dan efisiensi atas capaian kinerja sasaran perlu diadakan pembinaan bagi keberhasilan pelaksanaan pelatihan. Adapun tingkat perbandingan dengan realisasi anggaran sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.7

Tingkat Efektifitas dan Efisiensi Kinerja Sasaran Cakupan kelompok masyarakat yang mampu memanfaatan teknologi informasi

No	Sasaran	Indikator		Satuan	Kinerja			Keuangan			
					Target	Realisasi	(%)	Program	Pagu	Realisasi	%
1	Meningkatnya kemampuan masyarakat dalam pemanfaatan teknologi informasi sebagai salah satu upaya pemberdayaan masyarakat	1.1	Cakupan kelompok masyarakat yang mampu memanfaatan teknologi informasi	Kelompok	100	100	**100%**	1 Program Pelatihan SDM dalam bidang komunikasi dan informasi	100.000.000	98.550.8900	98.55
		RATA-RATA CAPAIAN DARI 3 INDIKATOR						**TOTAL PER SASARAN**	**3.700.000.000**	**3.504.806.953**	**94.72**
TINGKAT EFISIENSI 19.32 %											
TINGKAT EFEKTIFITAS 120.39 %											

Untuk meningkatkan capaian kinerja sasaran, berdasarkan hasil evaluasi dan analisis tersebut diatas, maka dimasa yang akan datang direkomendasikan/solusi perbaikan sbb :

1. Dalam pelatihan perlu didukung pra test dan past test untuk mengetahui sasaran bahwa yang bersangkutan merupakan kelompok yang sudah terdefinisikan.

D. Akuntabilitas Keuangan

Selama tahun 2017 pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi serta untuk mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai Dinas Kominfo Kota Pekalongan dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Pekalongan DPA Dinas kominfo Kota Pekalongan dengan total nilai keseluruhan adalah sebesar Rp. 7.950.849.000,00 sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp.7.459.520.367,00 atau dengan serapan dana APBD mencapai 93.82%, dengan demikian dapat dikatakan tahun 2017 kondisi anggaran adalah Silpa Rp. 491.328.976 hal ini merupakan upaya penghematan penggunaan anggaran agar lebih efisien.

Adapun rincian pagu dan realisasi anggaran yang terkait dengan pencapaian target kinerja tujuan dan sasaran pada setiap Misi Renstra Dinas Kominfo Kota Pekalongan pada tahun 2017 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.8

Pagu dan Realisasi Anggaran Dinas Kominfo Kota Pekalongan

Tahun 2017

No.	Misi	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	%
1	Meningkatnya kualitas pelayanan berbasis teknologi informasi	2.460.500.000,00	2.269.368.652,00	92,23%
2	Meningkatnya kemampuan masyarakat dalam pemanfaatan teknologi informasi sebagai salah satu upaya pemberdayaan masyarakat	100.000.000,00	98.550.900,00	98.55%
	Jumlah	**2.560.500.000,00**	**2.367.919.552,00**	**95,65**

Dari tabel diatas dapat diketahui anggaran yang direncanakan dan dimanfaatkan untuk pencapaian misi organisasi serta tingkat efisisensi yang telah dilakukan oleh Dinas Kominfo Kota Pekalongan pada tahun 2017.

Untuk mengetahui efektifitas anggaran terhadap capaian Misi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pekalongan, dapat diketahui dari capaian kinerja misi dan anggaran yang digunakan pada tahun 2017 sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.9

Efektifitas Anggaran terhadap Capaian Misi Dinas Kominfo Kota Pekalongan

Tahun 2017

No.	Kategori	Jumlah Indikator	Presentase Capaian Kinerja	Anggaran	
				Realisasi (Rp.)	%
A.	**Misi 1,**			2.269.368.652.	8.77%
1	Melebihi/Melampaui Target	1	100%		
2	Sesuai Target				
3	Tidak Mencapai Target				
B.	**Misi 2,**			**98.550.900**	**98.55%**
1	Melebihi/Melampaui Target				
2	Sesuai Target	**1**	**100%**		
3	Tidak Mencapai Target				

Pencapaian Misi pada Tahun 2017 merupakan akumulasi pencapaian kinerja tahun pertama Renstra 2016-2021, dengan demikian diuraikan pula capaian misi berdasarkan realisasi anggaran selama kurun waktu 1 (satu) tahun sebagai berikut :

Tabel 3.10

Penyerapan Anggaran pada setiap Misi Dinas Komifo Kota Pekalongan2017-2018

No.	Misi	Pagu Indikatif Renstra (Rp.)	Realisasi Anggaran tahun ke-		Jumlah	% (dari Pagu Indikatif)
			1	2 dst		
A.	Misi 1 : Meningkatnya kualitas pelayanan berbasis teknologi informasi	**14.694.500.000**	2.382.188.064	2.269.368.652.	4.651.556.716	31.67%
B.	Misi 2 : Meningkatnya kemampuan masyarakat dalam pemanfaatan teknologi informasi sebagai salah satu upaya pemberdayaan masyarakat	**600.000.000**	**98.515.950**	**98.550.800**	**197.066.750**	**32.84%**

Secara umum efektifitas anggaran terhadap capaian Misi Dinas Kominfo Kota Pekalongan, dapat disimpulkan bahwa anggaran yang digunakan efektif / kurang efektif terhadap capaian kinerja misi organisasi.

E. Prestasi dan Penghargaan

Dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas kominfo Kota Pekalongan dilakukan secara optimal dengan mengerahkan sumber daya dan potensi yang dimiliki, sehingga Dinas Kominfo Kota Pekalongantelah memperoleh penghargaan yang diberikan oleh pimpinan maupun stakeholder atas prestasi yang dicapai, prestasi dan penghargaan selama kurun waktu 1 (satu) tahun tersebut, sebagai berikut :

1. Prestasi Tingkat Provinsi Jawa **Tengah**

No.	Prestasi	Penghargaan	Tahun
1	Peringkat I Jawa tengah	“Badan Publik Inovatif Tingkat Jawa Tengah”	2017
2.	Peringkat I Jawa tengah	“Badan Publik Terbuka dan Inovatif”	2017

BAB IV
P E N U T U P

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Komifo Kota PekalonganTahun 2017 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (Good Governance) Kominfo Kota PekalonganTahun 2017. Pembuatan LKjIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2017 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

LKjIP Dinas Kominfo Kota PekalonganTahun 2017 ini dapat menggambarkan kinerja Dinas Kominfo Kota Pekalongandan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Dalam tahun 2017 Dinas kominfo Kota Pekalongan menetapkan sebanyak sepuluh (10) sasaran sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2017 yang ingin dicapai. Secara rinci pencapaian sasaran dapat dijelaskan sebagai berikut :

Sasaran 1 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 83.58 % atau interpretasi sangat baik
Sasaran 2 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 100.00 % atau interpretasi baik

Dari hasil pengukuran terhadap pencapaian sebanyak dua sasaran tersebut, secara umum telah mencapai sesuai target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja.

Dalam Tahun Anggaran 2017 untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Kominfo Kota Pekalongandalam rangka mencapai target kinerja yang ingin dicapai dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp. 7.950.849.000,00 sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp. 7.459.520.367,00 atau dengan serapan dana APBD

mencapai 93.82%, dengan demikian dapat dikatakan tahun 2017 kondisi anggaran adalah Silpa Rp. 491.328.976

Renstra Dinas Kominfo Kota Pekalongan 2016-2021 menetapkan sebanyak 10 (sepuluh) sasaran dengan 11 (sebelas) indikator kinerja tersebut telah dilaksanakan melalui Rencana Kinerja Tahunan tahun pertama dari lima tahun yang direncanakan yaitu pada tahun 2017 mencapai interpretasi baik.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kominfo Kota Pekalonganini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Dinas Kominfo Kota Pekalongan kepada pihak-pihak terkait baik sebagai stakeholders ataupun fihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kota Pekalongan.

Pekalongan, Januari 2018

KEPALA DINAS KOMINFO
KOTA PEKALONGAN

Dr. SRI BUDI SANTOSO, MSi
Pembina Utama Muda
NIP. 19701219 199603 2 001.